

**ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN LANGKAT**

**TAHUN 2017**

**OLEH :**

**ANDRE EFROZA**

**148520007**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Desember 2018



(Andre Efroza)

14.852.0007

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademi Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Efroza

NPM : 148520007

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA ALAM DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 Desember 2018

(Andre Efroza)

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Langkat  
Tahun 2017.

Nama : Andre Efroza

NPM : 14.852.0007

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Drs. H. Irwan Nasution, SPd, M.AP.

Pembimbing I

  
Walid Musthafa S.Sos, M.I.P.

Pembimbing II



Dr. H. Meri Kusmanto, MA

Dekan

Tanggal Lulus :

## ABSTRAK

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dalam melakukan penanggulangan bencana dan untuk mengetahui apa saja bencana alam yang terjadi di Kabupaten Langkat, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi bencana dan bagaimana upaya mengatasinya. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang cukup sering mengalami bencana di tahun 2017. Sehingga diperlukan kinerja yang baik untuk menanggulangi bencana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan kejadian dengan jelas dan akurat. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan observasi secara langsung dengan cara mengambil data di BPBD Kabupaten Langkat, mewawancara pegawai BPBD dan masyarakat yang pernah terkena bencana di tahun 2017. Seluruh data tersebut lalu dikumpulkan dan di analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan lima indikator untuk menentukan keberhasilannya, yaitu, Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Langkat memiliki kinerja penanggulangan bencana yang cukup baik meskipun belum maksimal karena tidak semua indikator yang digunakan untuk menilai terpenuhi. Terdapat juga beberapa hambatan – hambatan yang dihadapi BPBD dalam menanggulangi bencana alam, namun BPBD Kabupaten Langkat juga memiliki upaya – upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar kinerja mereka tidak terganggu.

**Kata Kunci : Kinerja, Penanggulangan, Bencana Alam**

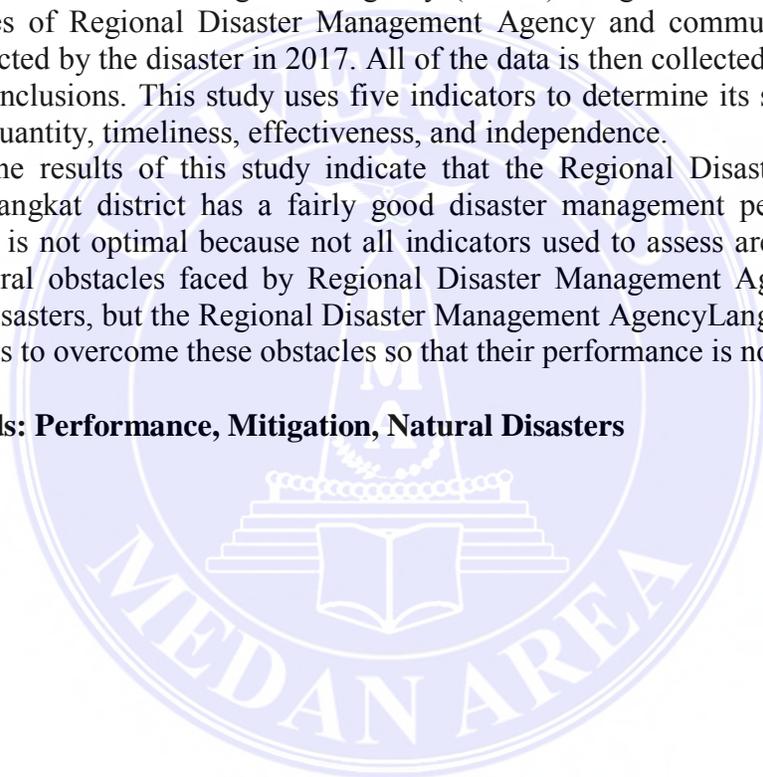
## ABSTRACT

The writing of this paper aims to analyze the performance of the Langkat District Disaster Management Agency (BPBD) in conducting disaster management and to find out what natural disasters occur in Langkat Regency, as well as what obstacles are faced in tackling disasters and how to overcome them. As for the background of this writing because Langkat District is a region that has quite often experienced disasters in 2017. So that good performance is needed to overcome the disaster. This research uses descriptive qualitative research methods with the aim of describing events clearly and accurately.

This study uses data collection by direct observation by collecting data in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Langkat District, interviewing employees of Regional Disaster Management Agency and communities who have been affected by the disaster in 2017. All of the data is then collected and analyzed to obtain conclusions. This study uses five indicators to determine its success, namely, quality, quantity, timeliness, effectiveness, and independence.

The results of this study indicate that the Regional Disaster Management Agency Langkat district has a fairly good disaster management performance even though it is not optimal because not all indicators used to assess are met. There are also several obstacles faced by Regional Disaster Management Agency in tackling natural disasters, but the Regional Disaster Management Agency Langkat District also has efforts to overcome these obstacles so that their performance is not disrupted.

**Keywords: Performance, Mitigation, Natural Disasters**



## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat-Nya yang senantiasa melindungi dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi syarat untuk tugas akhir yang merupakan persyaratan wajib bagi mahasiswa Universitas Medan Area pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah mengalami banyak kesulitan. Namun dengan adanya kemauan yang keras dan tanggung jawab penulis dapat melewati kesulitan tersebut. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Langkat Tahun 2017”.

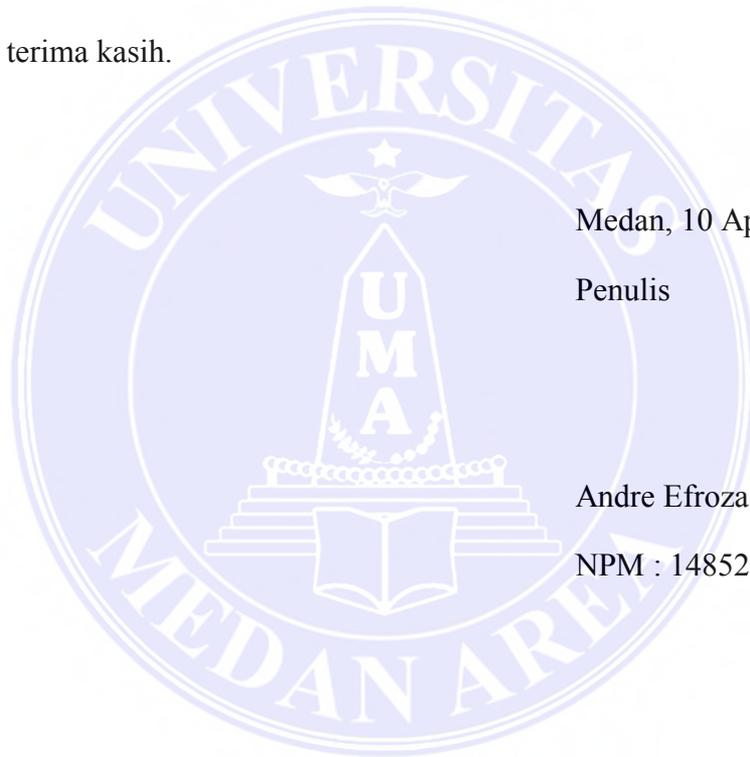
Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak – pihak yang turut mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus serta penghargaan setinggi – tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga yang memberikan dorongan doa, nasihat, motivasi dan dukungan materi selama penulis menempuh studi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Heri Kusmanto selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, M.AP. Selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Walid Musthafa S.Sos, M.IP. Selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Nasrullah Hidayat, SPd, M.Sc. Selaku sekretaris pembimbing yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd Selaku ketua program studi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Sahabat – sahabat seperjuangan saya Herdian Syahputra, M. Rifaldi, M. Nuh, Yudha Pranata, Roy Anggi Putra Sipahutar, Yasin Rabbani terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
8. Sahabat – sahabat seperjuangan saya Ririn Syafitri, Inda Wardah Hasibuan, Dwi Putri Rachmawati, Rizka Fatimah, Khoirunnisa Siregar, Rizky Fitrah Denok, Rizqy Salam Lubis, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
9. Teman – teman seperjuangan Administrasi Negara Vindy, Ulfi, Yusmaniar, Rizka, Ayu, Anggi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Seluruh Staf dan Dosen Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Medan Area.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama pembuatan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atau segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



Medan, 10 April 2018

Penulis

Andre Efroza

NPM : 148520007

## DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan .....	iii
Halaman Persetujuan Publikasi .....	iv
Riwayat Hidup .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Analisis .....	6
2.2 Pengertian Kinerja .....	7
2.2.1 Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	7
2.2.2 Indikator Kinerja Karyawan .....	8
2.2.3 Fungsi Penilaian Kinerja .....	10
2.3 Pengertian Bencana .....	11
2.4 Pengertian Penanggulangan .....	13
2.4.1 Penanggulangan Bencana .....	13
2.4.2 Upaya Penanggulangan Bencana .....	15
2.5 Kerangka Pemikiran .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	19
3.1.1	Jenis Penelitian .....	19
3.1.2	Sifat Penelitian .....	20
3.1.3	Lokasi Penelitian .....	20
3.1.4	Waktu Penelitian .....	20
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	20
3.3	Metode Analisa Data .....	23

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Sejarah Singkat BPBD Kab. Langkat .....	25
4.2	Visi dan Misi BPBD Kab. Langkat .....	26
4.3	Tujuan dan Sasaran.....	27
4.4	Gambaran Umum Kantor BPBD Kab. Langkat .....	28
4.5	Data Bencana Kab. Langkat Tahun 2017.....	39
4.6	Analisa Kinerja BPBD Kab. Langkat .....	45

#### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	56
5.2	Saran .....	57.

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
-----------------------------	----

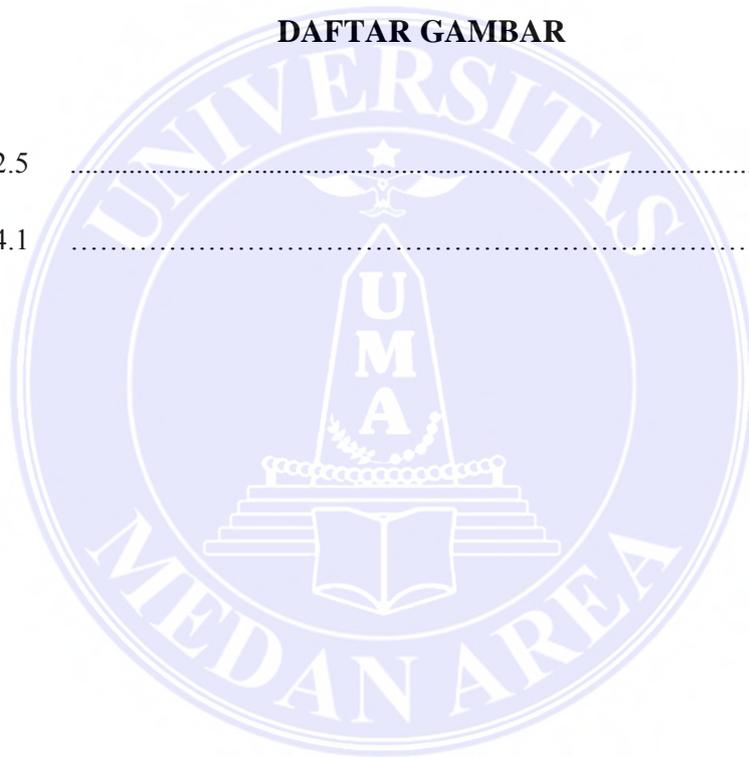
#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	.....	40
Tabel 4.2	.....	42
Tabel 4.3	.....	43
Tabel 4.4	.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5	.....	18
Gambar 4.1	.....	31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Langkat merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa. Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya. Adalah suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat dalam suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien. Didalam menjalankan aktifitas pemerintahannya, pemerintah Kabupaten Langkat membentuk badan penanggulangan bencana daerah yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan kegiatannya berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten langkat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan

Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Kondisi daerah Kabupaten Langkat memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Informasi mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Langkat seperti yang dilansir oleh media online [republika.co.id](http://republika.co.id) pada tanggal 6 November 2017 mencatat ada enam Kecamatan dilanda banjir akibat hujan deras serta meluapnya beberapa sungai. Enam Kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Tanjung Pura merendam rumah milik 699 kepala keluarga, Kecamatan Padang Tualang 264 kepala keluarga, Kecamatan babalan 700 kepala keluarga, Kecamatan Besitang 500 kepala keluarga, dan Kecamatan Sawit Seberang 25 kepala keluarga.

Bencana lain yang terjadi di Kabupaten langkat ialah angin puting beliung yang terjadi di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Wampu, Kecamatan Gebang dan Kecamatan Berandan Barat pada tanggal 17 Mei 2017. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Langkat, tercatat 14 rumah, 2 warung, 1 bangunan

gudang mengalami kerusakan dan 3 buah tiang listrik tumbang. Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir dan angin puting beliung yang dimulai dari kerugian materi serta menimbulkan korban jiwa, maka penanganan masalah tersebut harus dilakukan dengan serius. Pasalnya bencana tersebut dapat mengganggu proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Kinerja merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang dapat diartikan sebagai hasil kerja. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kinerja kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu terjadi tidak seperti seharusnya. Kinerja dari pegawai atau karyawan dapat dinilai dari sejauh mana dia dapat melakukan tugas-tugasnya.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas.

BPBD di Kabupaten Langkat sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Adapun tugas dari lembaga ini adalah agar mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di daerah rawan bencana menyadari pentingnya penanggulangan bencana, dan mengurangi dampak dari bencana yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Badan penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan kebijaksanaan, penyusunan program pelaksanaan, pengawasan

dan pengendalian dalam bidang penanggulangan bencana alam Kabupaten Langkat. Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar segala bencana alam yang terjadi di Kabupaten Langkat dapat ditanggulangi dengan baik dan cepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Langkat Tahun 2017.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang timbul pada waktu analisis dapat juga berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan. Masalah muncul karena tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian. disamping itu masalah dapat muncul juga karena keraguan tentang keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui lebih lanjut secara mendalam dan objektif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam menanggulangi bencana?
2. Apa saja hambatan dan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam melakukan penanggulangan bencana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat atau berguna bagi:

1. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa Universitas Medan Area dan sekitarnya, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap Sumber Daya Manusia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan dan informasi yang objektif kepada pemerintah dan masyarakat mengenai kinerja dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti meliputi:

#### **2.1 Pengertian Analisis**

Menurut Komarudin (dalam Anggara 2015:20) mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Menurut Robert J. Schreiter (dalam Anggara 2015:22) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari pengertian diatas analisa dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

## **2.2 Pengertian Kinerja**

Cherington mengatakan bahwa kinerja menunjukkan pencapaian target kerja yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kecakapan dan waktu. Kinerja yang optimal akan terwujud bila organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi dan kecakapan yang sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kondisi yang memungkinkan agar mereka bekerja secara maksimal (Suhendi,2012:23).

Kinerja merupakan sesuatu yang lazim digunakan untuk memantau produktivitas kerja sumber daya manusia, baik yang berorientasi pada produksi barang, jasa, maupun pelayanan. Agar tercapainya kinerja yang professional, hal-hal seperti kesukarelaan, pengembangan diri pribadi, pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya perlu untuk dikembangkan (Suhendi,2012:25).

### **2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

#### **1. Efektifitas dan Efisiensi**

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien (Prawirosentono, 1999:27).

## 2. Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

## 3. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku (Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

## 4. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.(Prawirasentono, 1999:27)

### **2.2.2 Indikator Kinerja Karyawan**

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada lima indikator, yaitu (Robbins, 2006:260) :

### 1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

### 2. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

### 3. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

### 4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

### 5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

### 2.2.3 Fungsi Penilaian Kinerja

Menurut Handoko(2008), penilaian kinerja dapat digunakan untuk :

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan prestasi
2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk gaji lainnya.
3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu.
4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga sebaliknya, kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.
5. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.
6. Penyimpangan-penyimpangan proses penempatan kerja, kinerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur penempatan kerja departemen personalia.

7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, seperti sistem informasi manajemen. Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak tepat.
8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.
9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.
10. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya. Berdasarkan penilaian kinerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan.

### **1.3 Pengertian Bencana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Parker (1992), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi, disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Coburn, A. W. (dalam Purnomo, hadi, 1994:16) mengemukakan bahwa bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberi peningkatan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada diluar kapasitas normal.

Menurut Purnomo dan Sugiantoro (2010:9) pemahaman tentang istilah bencana dari beberapa orang meskipun beragam, namun pada akhirnya semuanya mengindikasikan sebagai peristiwa buruk yang merugikan kehidupan manusia.

Pengertian Bencana sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu: 1. Bencana Alam. Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

#### **1.4 Pengertian Penanggulangan**

Diambil dari kata *disaster management* (Penanggulangan bencana atau manajemen bencana), maka penanggulangan dapat juga diartikan sebagai manajemen. M. Fuad (2006:94) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Terry (dalam Inu Kencana Syafii, 2003:117), yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, Berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.

##### **1.4.1 Penanggulangan Bencana**

Menurut Carter (dalam Hadi Purnomo dan Ronny Sianturi 2010:93) mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan – tindakan terkait dengan pencegahan, mitigasi, persiapan, respon darurat dan pemulihan. Dan Menurutnya, tujuan dari manajemen bencana

diantaranya yaitu, mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat Negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Undang – undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang – undang No.24 Tahun 2007 Pasal 4), yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pengertian penanggulangan bencana diatas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana adalah koordinasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat penting dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya bencana.

## 2.4.2 Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (6))
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 1 ayat (7))
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (Pasal 1 ayat (8))
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9))
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 ayat (10))

6. Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (11))
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (12))

Dari pengertian – pengertian diatas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya di wilayah yang terkena bencana.

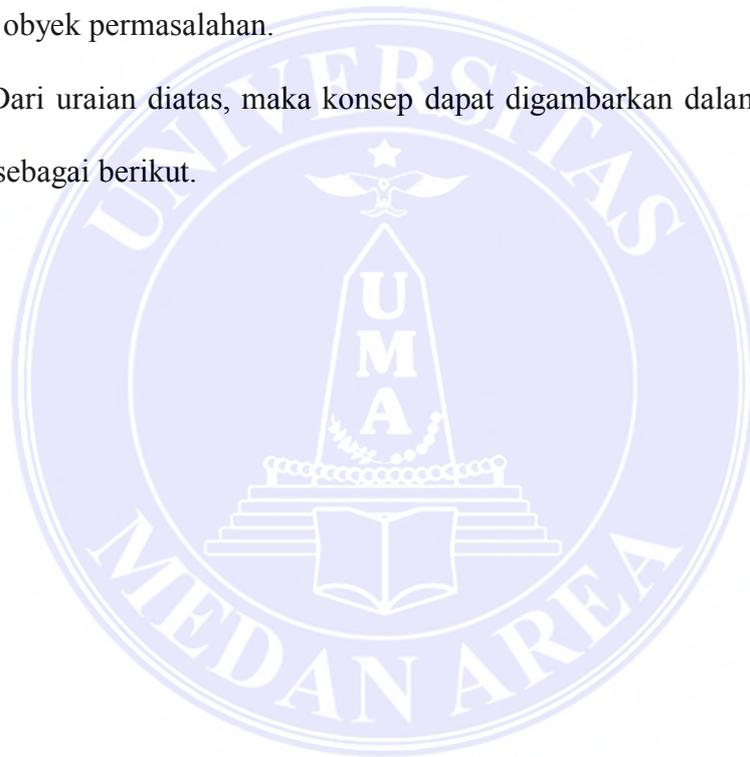
## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian yang memaparkan dimensidimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis.

Nawawi (1995:43) bahwa kerangka itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

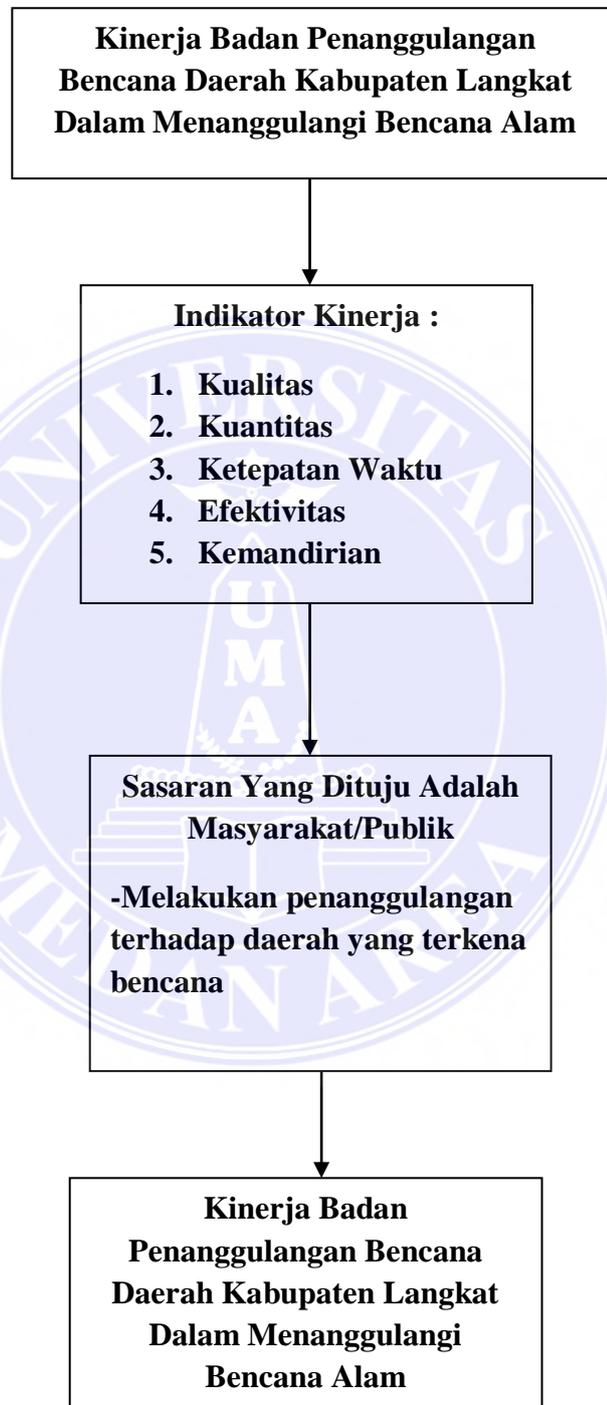
Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Dari uraian diatas, maka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis sebagai berikut.



**Gambar 2.5**

**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dipilihnya metode ini karena data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, kalimat, ataupun narasi. Selain itu metode ini menggunakan cara berpikir yang induktif, yaitu berpikir yang terangkat dari hal-hal yang khusus atau fakta yang jelas untuk menuju hal-hal yang umum.

Menurut Sugiyono (2016:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini penulis memaparkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana, apakah sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya atau belum.

Menurut Sahya Anggara (2015:28) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dan lokasi-lokasi di daerah Kabupaten Langkat yang pernah mengalami bencana.

### **3.1.4 Waktu Penelitian**

Dalam Penyusunan Skripsi ini, Penelitian dilakukan selama bulan februari sampai bulan April.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Data dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan

diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain selain objek utama.

Menurut Juliansyah Noor (2011:138) Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Adapun metode pengumpulan datanya sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Menurut Arikunto (2006:155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari informan agar memperoleh informasi yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Informan Kunci : Kepala BPBD Kabupaten Langkat.
- b) Informan Utama : Pegawai BPBD Kabupaten Langkat.
- c) Informan Tambahan : Masyarakat.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti

mengumpulkan data berdasarkan data yang didapat dari BPBD Kabupaten Langkat dan laporan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

### 3. Observasi

Observasi atau Pengamatan adalah tugas yang memerlukan suatu sistem pemikiran. Tidaklah mungkin untuk mengamati dan mencatat semua hal terjadi dan jarang ada gunanya hanya untuk menulis penjelasan yang sifatnya Deskriptif atas hasil pengamatan yang diperoleh. Menurut Husaini Usman (2011:52) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

### 4. Kepustakaan

Studi pustaka pada penelitian ini digunakan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan materi yang mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, skripsi, jurnal, karya-karya ilmiah, jurnal, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### 5. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

### 3.3 Metode Analisa Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (dalam Afrizal 2014:178) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga kemudian kembali ketahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu suatu proses untuk memudahkan analisis data agar melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap proses analisis data saling berhubungan dan senantiasa dilakukan dalam waktu bersama.

2. Penyajian Data

Yaitu selama proses penelitian berlangsung, penulis selalu memperhatikan dan menganalisis terhadap data baru yang diperoleh dan diambil berdasarkan kasus-kasus fakta yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid pada saat dilapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Langkat**

Pada prinsipnya peraturan bupati ditetapkan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pemerintah kabupaten langkat dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Langkat.

Sebagai upaya meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara pemerintah daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Pusat.

Organisasi perangkat daerah di bentuk dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan daerah, cakupan tugas , luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas. Dan sebagaimana di atur dalam Pasal 25 undang – undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan pada peraturan bupati langkat nomor 23 tahun 2009.

Dan berdasarkan geografis daerah kabupaten langkat yang merupakan daerah rawan bencana berupa gempa bumi karena alam, angin topan, tanah longsor, banjir badang, kekeringan, kebakaran hutan dan kejadian – kejadian alam, maka perlu untuk membentuk lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **4.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Langkat**

##### **A. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mengubah kondisi yang kurang menjadi lebih baik. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2019 adalah *Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana*.

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kantor agar tercapainya visi di kantor tersebut. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan.

##### **B. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu sasaran yang akan dicapai, menetapkan tujuan organisasi serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Setelah memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai perkembangan lingkungan strategis maka Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah :

- 1) Mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana.
- 2) Mewujudkan system penanggulangan bencana yang handal dan tepat guna.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

#### **4.3 Tujuan dan Sasaran**

Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana di BPBD kabupaten langkat merupakan hal yang sangat penting dalam membantu peningkatan penanganan pencegahan bencana alam di daerah.

Latar belakang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD di kabupaten langkat adalah membahas masalah-masalah pokok sesuai usulan, aspirasi dan pendapat warga masyarakat, seperti dalam penanganan pencegahan bencana alam di daerah.

Tujuan dan sasaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten langkat adapun tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian adalah :

### **A. Tujuan**

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya bencana sadar bencana.
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dan tepat, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, pascabencana.
3. Mewujudkan penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.

### **B. Sasaran**

1. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat, simulasi penanggulangan bencana dan bimtek penanggulangan bencana terhadap siswa/pelajar.
2. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana, kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
3. Terciptanya kualitas dan profesionalisme SDM BPBD dan ketangguhan masyarakat dalam menanggulangi bencana.

## **4.4 Gambaran umum kantor BPBD Kabupaten Langkat**

### **A. Letak kantor BPBD Kabupaten Langkat**

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Tepatnya di Jl. Patimura No. 03 Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kecamatan Stabat adalah salah satu dari 23 kecamatan di kabupaten langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan stabat berbatasan dengan kecamatan wampu di sebelah barat, kabupaten deli serdang di timur, kecamatan binjai di selatan, dan kecamatan secanggang di sebelah utara. Kecamatan ini mempunyai luas 90.64 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya sebesar 85.589 jiwa. Kepadatan kecamatan ini 851 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **B. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

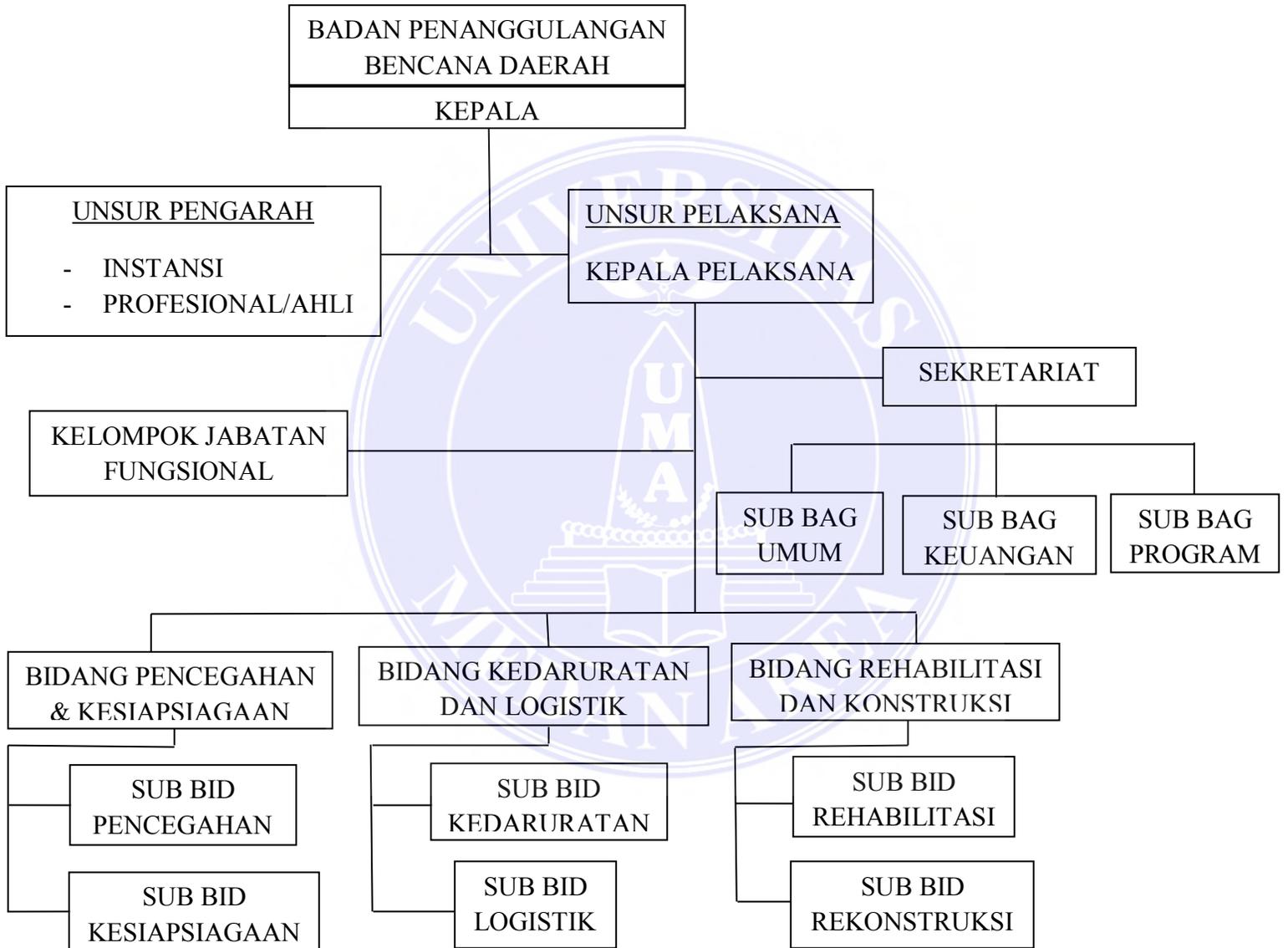
Adanya organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten langkat sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

**BAGAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN  
LANGKAT**



### **C. Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat**

Sesuai dengan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati ( Perbup ) Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

#### **1. Kepala Pelaksana**

Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.

A. Kepala pelaksana mempunyai mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan penetapan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana terpadu dan menyeluruh.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala pelaksana mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi.
2. Prabencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.
3. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
4. Membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan perlatan.
5. Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalin terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

A. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan perencanaan, dan perumusan kebijakan lingkungan BPBD.
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hokum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
4. Pengumpulan data dan informasi kebenaran.
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
6. penyiapan RENSTRA, RENJA,RKT, LPPD,LKPJ,TAPKIN,IKU, dan LAKIP BPBD.

B. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian ketatausahaan.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan terutama penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
3. Mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan serta perawatan.
4. menyiapkan RENSTRA,RENJA,RKT,LPPD,LKPJ,TAPKIN,IKU dan LAKIP BPBD.
5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sekretariat.

### **3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

A. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- B. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
  2. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan di bidang pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
  3. Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
  4. merumuskan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan peningkatan kapasitas.
  5. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
  6. Merumuskan kebijakan system peringatan dini dan rencana untuk keadaan darurat bencana.
  7. Merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya.
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan.

#### **4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

A. Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
3. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

B. Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan penanganan darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik.
2. Merumuskan kebijakan penanganan keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan logistik.
5. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

## **5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

### **A. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :**

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

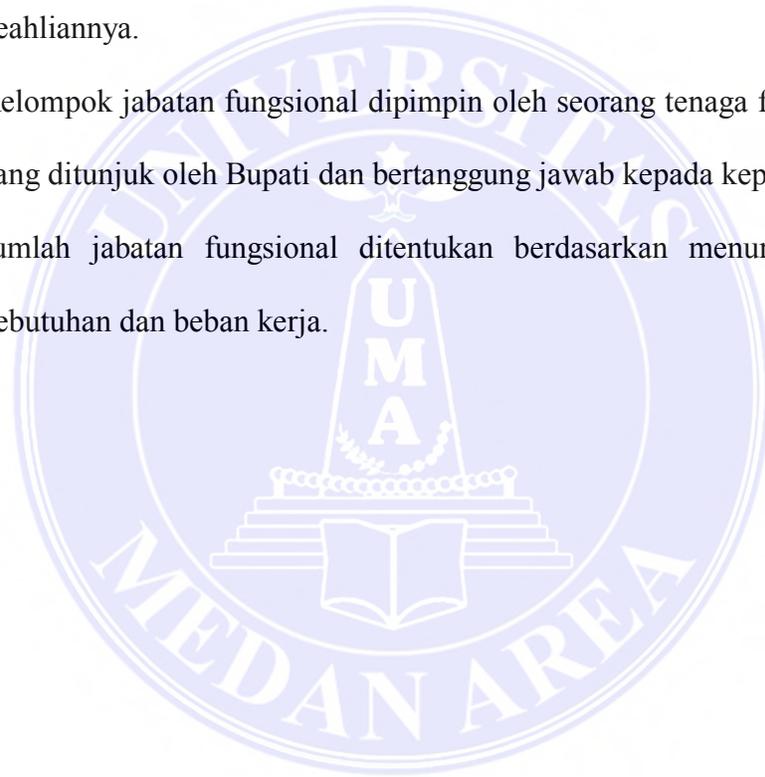
### **B. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas :**

1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
2. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

## **6. Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.



#### **4.5 Data Bencana Kabupaten Langkat Tahun 2017**

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Kondisi daerah Kabupaten Langkat memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Ada 3 (tiga) jenis jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2017, yaitu :

1. Banjir

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai tersebut.

Banjir terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah, sekolah, rumah ibadah dan bangunan-bangunan yang dibangun di daerah rawan banjir. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan menjauh dari sungai dan badan air lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan

memanfaatkan biaya murah serta karena kesulitan mencari tempat tinggal di tempat lain. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap di daerah rawan banjir lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik.

Di Kabupaten Langkat sendiri, tercatat 17 kejadian bencana banjir terjadi di berbagai daerah rawan banjir pada tahun 2017. Berikut data yang penulis dapatkan dari BPBD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.1

TAHUN	BENCANA	DATA KORBAN			KERUSAKAN		
		Luka - luka	Pengungsi (Jiwa)	Terdampak (KK)	Lahan Pertanian (Ha)	Fasilitas umum	
						Sekolah	Rumah Ibadah
2017	17	-	3711	6857	1485, 5	7	2

Sumber : BPBD Kabupaen Langkat

## 2. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lamakejadian meksimum lima menit. Di daerah sumatera angin puting beliung sering disebut dengan angin bahorok, karena kecamatan bahorok di kabupaten Langkat adalah salah satu daerah yang paling sering mengalami bencana angin tersebut. Angin puting beliung sering terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati akan terangkat dan terlempar.

Pada tahun 2017, tercatat 18 kejadian bencana angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Langkat. Berikut rincian data yang penulis dapatkan dari BPBD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.2

TAHUN	BENCANA	DATA KORBAN			KERUSAKAN				
		Luka	Pengungsi	Terdampak (KK)	Rumah			Fasilitas umum	
	Angin Puting Beliung	Luka	Pengungsi	Terdampak (KK)	Rusak berat (Unit)	Rusak sedang (Unit)	Rusak ringan (Unit)	sekolah	Rumah ibadah
2017	18	1	-	278	71	42	140	5	5

Sumber : BPBD Kabupaten Langkat

### 3. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua factor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah factor-factor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan factor pemicu adalah factor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.

Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi bumi, namun adapula factor-factor lainnya yang juga memengaruhi, seperti erosi yang disebabkan oleh

aliran permukaan air atau air hujan, lereng dari bebatuan, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, ataupun getaran dari mesin.

Di Kabupaten Langkat, tercatat telah terjadi 22 kejadian bencana longsor pada tahun 2017. Berikut rincian data yang penulis dapatkan dari BPBD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.3

TAHUN	BENCANA	KERUSAKAN			
	LONGSOR	Rumah rusak berat	Fasilitas Umum		
			Tanggul	Jalan	Jembatan
2017	22	1 Unit	8	5	9

Sumber : BPBD Kabupaten Langkat

Berikut ini adalah data keseluruhan bencana alam yang terjadi di tahun 2017 di Kabupaten Langkat yang penulis dapatkan dari BPBD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.4

**REKAPITULASI DATA BENCANA KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017**

BULAN	JUMLAH KEJADIAN BENCANA					TERDAMPAK					KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA					
	Banjir	Angin Puting Beliu ng	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Lon g sor	L u k a - l u k a	M e n i n g g a l (j i w a )	Pengu ngsi (Jiwa)	Banjir (KK)	Lahan Pertanian	FASILITAS UMUM					
											Rumah Penduduk			Sekolah		
											R B	R S	RR	R B	R S	R R
JANUARI	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
APRIL	5	2	10	-	-	-	-	122	1753	861	-	4	-	-	-	-
MEI	2	6	1	-	-	-	-	29	884	335	3	18	39	-	-	-
JUNI	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	21	-	-	-
JULI	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11	3	-	-	-
AGUSTUS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	92	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OKTOBER	1	1	-	-	-	-	-	3530	1552	200	-	6	16	-	-	-
NOVEMBER	6	-	1	-	-	-	-	30	6125	923	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.711</b>	<b>10.314</b>	<b>2318,5</b>	<b>32</b>	<b>75</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat

#### **4.6 Analisis Kinerja BPBD Kabupaten Langkat**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana di sekitar masyarakat. Analisis kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mengetahui baik atau buruknya kinerja dari BPBD Kabupaten Langkat.

Menurut Robbins (2006:260) mengatakan bahwa indikator untuk mengukur kinerja ada lima aspek, yaitu :

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian

Dari kelima aspek tersebut, penulis akan meneliti berdasarkan kelima aspek tersebut untuk menilai bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina,2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Untuk mengetahui kualitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Dalam meningkatkan kualitas kerja terhadap pegawai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat melakukan pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, seperti yang diutarakan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Bapak Drs. Irwan Syahri sebagai berikut :

“Untuk terus meningkatkan kualitas kita, di BPBD Kabupaten Langkat ini kita sering mengadakan pelatihan terhadap tim reaksi cepat (TRC). TRC adalah tim yang akan langsung terjun ke tempat kejadian setiap ada laporan terjadinya bencana. Maka dari itu TRC haruslah terdiri dari orang - orang yang punya kemampuan, terampil, dan cekatan. Karna merekalah orang - orang yang pertama

yang akan membantu daerah yang akan terkena bencana sekaligus membuat laporan dari bencana itu sendiri.”

(Wawancara kepada Drs. Irwan Syahri, 6 Maret 2018)

Mengenai kualitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Salah satu warga dusun VII desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lengan yang desanya pernah mengalami banjir pada 4 Desember 2017, Bapak Suryanto mengatakan sebagai berikut :

“Kalau menurut saya menilai kualitas dari BPBD ini ya cukup bagus, karena mereka kerjanya cepat, memberikan bantuan yang dibutuhkan sama desa kami, dan juga pelayanannya yang baik.”

(Wawancara kepada Bapak Suryanto, 10 Maret 2018)

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh bapak Arifin warga desa Minta Kasih Kecamatan Salapian yang desanya pernah mengalami angin puting beliung pada 22 Agustus 2017. Beliau mengatakan sebagai berikut :

“Menurut saya kualitas kinerja dari BPBD ini bisa dibilang baik. Karena dari yang saya lihat, pegawai-pegawai yang mereka turunkan ke desa kami itu bekerja dengan cepat dalam membantu warga.”

(Wawancara kepada Bapak Arifin, 12 Maret 2018)

Selanjutnya juga hal yang sama disampaikan oleh bapak Rudi, Warga desa Besilam Kecamatan Padang Tualang yang desanya pernah terendam banjir pada 5 November 2017. Beliau berpendapat sebagai berikut :

“Kualitas kerja dari BPBD Langkat sudah baik, saya melihatnya dari cara mereka menangani bencana di desa kami. Mereka menangani bencana disini cukup cepat dan melayani warga desa kami dengan baik.”

(Wawancara dengan Bapak Rudi, 15 April 2018)

Dari seluruh petikan wawancara tersebut ditemukan pendapat yang sama yang mengatakan bahwa kualitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sudah baik. Ditambah lagi dengan usaha dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kualitas dari para pegawainya, khususnya untuk tim reaksi cepat (TRC) yang selalu menjadi yang pertama – tama untuk melakukan penanggulangan bencana. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kualitas yang baik dari tim reaksi cepat agar kegiatan penanggulangan bencana alam bisa dapat lebih cepat diselesaikan dan dengan hasil yang baik pula.

## 2. Kuantitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa “Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”.

Dalam hal kuantitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tergantung pada jumlah bencana yang terjadi, seperti yang diutarakan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistik Bapak Noto Atmojo Amk sebagai berikut :

“Jumlah dari kegiatan penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini tergantung dari jumlah kejadian bencana. Jika banyak terjadi bencana maka banyak pulalah kegiatan penanggulangan yang kita lakukan, begitu pula sebaliknya.”

(Wawancara kepada Noto Atmojo Amk, 6 Maret 2018)

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa kuantitas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tergantung oleh jumlah kejadian bencana yang terjadi di kabupaten Langkat.

Namun dari data – data yang didapatkan dari BPBD Kabupaten Langkat, tercatat telah terjadi 17 bencana banjir, 18 bencana angin puting beliung, dan 22 bencana longsor selama tahun 2017. Dengan data yang ada tersebut, dapat dikatakan jika kuantitas dari kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat cukup banyak.

### 3. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Mengenai ketepatan waktu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Kepala BPBD Kabupaten Langkat Bapak Drs. Irwan Syahri memiliki pendapat sebagai berikut :

“Setiap mendapat laporan dari kecamatan bahwasanya di daerah tersebut terjadi bencana, baik itu bencana banjir, longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Kita akan langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengetahui dampak dari kejadian bencana tersebut dan mendata situasi dan luas cakupan dari bencana itu sendiri. Berdasarkan data tersebut, lalu dibuatlah laporan tentang apa yang harus ditangani, termasuk bantuan apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena bencana. Sehingga segala bentuk penanggulangan terhadap bencana tersebut bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat.”

(Wawancara kepada Drs. Irwan Syahri, 6 Maret 2018)

Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Noto Atmojo Amk juga mengatakan sebagai berikut :

“Setiap mendapat laporan tentang terjadinya bencana, kita akan mengirimkan Tim Reaksi Cepat untuk mengetahui rincian dari bencana yang terjadi. Setelah seluruh rincian diketahui, kita akan langsung menurunkan bantuan untuk desa yang mengalami bencana tersebut paling lama 1x24 jam.”

(Wawancara dengan Bapak Noto Atmojo Amk, 6 Maret 2018)

Warga yang pernah mengalami kejadian bencana, Bapak suryanto berpendapat sebagai berikut :

“Menurut saya BPBD ini cukup tepat waktu untuk memberikan bantuan kepada desa kita. Masyarakat di desa ini tidak sampai menunggu lama untuk mendapat bantuan dari BPBD.

(Wawancara kepada Bapak Suryanto, 10 Maret 2018)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Arifin sebagai berikut :

“Kalau untuk pemberian bantuan ke kami, saya rasa BPBD tepat waktu. Karena sehari setelah terjadinya bencana angin itu, mereka langsung memberikan bantuan yang dibutuhkan warga desa.”

(Wawancara kepada Bapak Arifin, 12 Maret 2018)

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat memiliki ketepatan waktu yang baik dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Karena dengan adanya tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Langkat, dapat mempercepat pembuatan laporan dari bencana yang sedang terjadi dan mempercepat untuk melakukan kegiatan penanggulangan.

#### 4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Amin Tunggal Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”.

Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah

ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Dalam hal efektivitas kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, kepala bidang kedaruratan dan logistik Bapak Noto Atmojo Amk berpendapat sebagai berikut :

“Efektivitas dari kegiatan penanggulangan bencana alam yang kita lakukan, bukan hanya tergantung dari pegawai – pegawai dari BPBD ini, tapi juga tergantung dari sebesar apa kejadian bencana yang terjadi. Karena jika kejadian bencana yang terjadi cukup besar luas cakupannya, maka akan dibutuhkan tenaga, alat, biaya dan waktu yang cukup banyak untuk menanggulangi bencana tersebut.”

(Wawancara kepada Noto Atmojo Amk, 6 Maret 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Drs. Irwan Syahri sebagai berikut

“Seberapa cepat kita bisa menyelesaikan penanggulangan bencana sangat tergantung pada besar atau kecilnya bencana yang terjadi. Karena jika kejadian bencananya cukup besar, maka kita akan membutuhkan bantuan dari pemerintahan kecamatan dan masyarakat sekitar untuk dapat lebih cepat memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana.”

(Wawancara kepada Drs. Irwan Syahri, 6 Maret 2018)

Warga yang pernah mengalami kejadian bencana, Bapak suryanto berpendapat sebagai berikut :

“Menurut saya kerja dari BPBD Langkat cukup efektif, Karena mereka bisa dengan cepat dalam memberikan bantuan terhadap warga disini.”

(Wawancara dengan Bapak Arifin, 12 Maret 2018)

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana sangat tergantung dari besar atau kecilnya bencana yang terjadi. Dan juga karena tidak bisa ditentukannya berapa lama kegiatan penanggulangan akan selesai.

## 5. Kemandirian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kemandirian berasal dari kata “mandiri” yang mendapat awalan ke- dan akhiran –an yang berarti ”hal-hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain”.

Dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Langkat tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Irwan Syahri sebagai berikut :

“Setiap melakukan penanggulangan bencana, kita tidak akan bisa melakukannya sendiri. Karena personil dan peralatan kita yang belum memadai. Jadi kita akan koordinasi dengan pihak – pihak terkait di daerah yang terjadi bencana untuk bisa membantu kita dalam melakukan penanggulangan bencana.”

(Wawancara kepada Drs. Irwan Syahri, 6 Maret 2018)

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Noto Atmojo Amk selaku Kepala bidang kedaruratan dan logistik yaitu sebagai berikut :

“Segala bentuk kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Langkat tentunya membutuhkan bantuan dari pihak – pihak yang lain, seperti warga sekitar terjadinya bencana dan pihak – pihak terkait dari kecamatan.”

(Wawancara kepada Noto Atmojo Amk, 6 Maret 2018)

Mengenai kemandirian dalam penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat, bapak Suryanto memiliki pendapat sebagai berikut :

“Menurut saya BPBD tidak bisa bekerja sendiri dalam menanggulangi bencana alam, karena mereka membutuhkan pihak dari desa dan warga sekitar untuk membantu mereka melakukan penanggulangan.”

(Wawancara kepada Bapak Suryanto, 10 Maret 2018)

Dari petikan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tidak dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana sendiri dan tetap membutuhkan bantuan dari pihak – pihak terkait. Hal ini dikarenakan kurangnya peralatan dan kurangnya personil yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Langkat.

#### **4.7 Hambatan Dan Upaya**

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat tetap menemui hambatan-hambatan yang dapat mengganggu mereka setiap melakukan penanggulangan bencana, seperti yang diutarakan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistik Bapak Noto Atmojo Amk sebagai berikut :

“Hambatan yang paling sering kita hadapi itu kekurangan personil, kurangnya peralatan, dan terkadang kesulitan mencapai daerah yang sedang terkena bencana. Jadi dengan adanya hambatan tersebut, kita akan berupaya mengatasinya dengan koordinasi dengan instansi terkait di kecamatan agar terpenuhi seluruh kebutuhan dalam penanggulangan.”

(Wawancara kepada Noto Atmojo Amk, 6 Maret 2018)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat, Bapak Drs Irwan Syahri juga berpendapat sebagai berikut :

“Hambatan hambatan yang biasa kita alami itu macam – macam, seperti kurangnya personil dan peralatan yang kita miliki, kondisi geografis daerah yang terkena bencana yang membuat kita sulit melakukan penanggulangan, dan juga terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melakukan penanggulangan bencana. Untuk upaya yang kita lakukan antara lain; koordinasi dengan pihak – pihak terkait di kecamatan dan desa untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana.”

(Wawancara kepada Drs Irwan Syahri, 6 Maret 2018)

Dari petikan wawancara tersebut, menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat memiliki hambatan-hambatan yang cukup mengganggu BPBD Kabupaten Langkat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Seperti kurangnya personil, kurangnya peralatan yang dibutuhkan, kurang tersedia anggaran yang memadai dan terkadang kesulitan untuk mencapai daerah yang sedang terkena bencana. Namun BPBD Kabupaten Langkat tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan koordinasi dengan instansi terkait di kecamatan agar seluruh kebutuhan masyarakat yang sedang terkena bencana dapat terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab – bab terdahulu telah diuraikan materi tentang kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat dalam hal penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Selanjutnya pada bagian ini, diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam sudah cukup baik, akan tetapi belum maksimal karena tidak semua indikator terpanuhi.
2. Hambatan – Hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah masih kurangnya personil, kurangnya peralatan, dan kesulitan untuk mencapai daerah yang terkena bencana untuk melakukan penanggulangan bencana. Dan juga kondisi geografis dari daerah yang terkena bencana tersebut.
3. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut adalah dengan cara koordinasi dengan pihak terkait di kecamatan agar dapat menutupi

kekurangan dan membantu BPBD kabupaten langkat melakukan penanggulangan bencana.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam bidang penanggulangan bencana harus ditambah. Sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tidak akan kekurangan personil lagi.
2. Peralatan dalam penanggulangan bencana alam harus ditambah dan dilengkapi. Pasalnya wilayah Kabupaten Langkat cukup rawan untuk terjadi bencana setiap tahunnya. Sehingga membutuhkan peralatan yang lebih lengkap agar proses penanggulangan bencana alam dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Erlangga
- Handoko, Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- T.H. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Matutina. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prawirosentono, S. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Purnomo, Hadi, dkk. 2010. *Manajemen Bencana*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Robbins, S.P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sarwoto. 1990. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung : Cv. Alfa Beta
- Suhendi, H dan Anggara, S. 2012. *Perilaku Organisasi*. Bandung : CV Pustaka Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wijaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta Jaya.

Wungu & Brotoharjo. 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Langkat No. 23 Tahun 2009

**Website :**

Komarrudin & Schreiter, R.J. 1991. Pengertian Analisa Menurut Ahli dalam <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>.

Parker. 1992. Pencegahan dan Manajemen Bencana dalam <http://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>.

<https://id.wikipedia.org>.

## Dokumentasi Penelitian



Foto kantor BPBD Kabupaten Langkat



Gudang tempat penyimpanan alat BPBD Kabupaten Langkat



Wawancara Dengan kepala BPBD Kabupaten Langkat. Bapak Drs. Irwan Syahri.



Foto BPBD Kabupaten Langkat melakukan Penanggulangan bencana banjir di desa Pematang Cengal Barat pada 3 Desember 2017.



Foto BPBD memberikan bantuan untuk desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura.

## LAMPIRAN

### 1. Pertanyaan Wawancara

- a. Wawancara kepada kepala dan pegawai BPBD Kab. Langkat
  1. Sejarah BPBD Kabupaten Langkat.
  2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Langkat.
  3. Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Langkat.
  4. Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Langkat.
  5. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Langkat.
  6. Tugas dan Fungsi Pegawai BPBD Kabupaten Langkat.
  7. Data Bencana Tahun 2017 di Kabupaten Langkat.
  8. Kualitas BPBD Kabupaten Langkat dalam penanggulangan bencana alam.
  9. Kuantitas BPBD Kabupaten Langkat dalam penanggulangan bencana alam.
  10. Ketepatan Waktu BPBD Kabupaten Langkat dalam penanggulangan bencana alam.
  11. Efektivitas BPBD Kabupaten Langkat dalam penanggulangan bencana alam.
  12. Kemandirian BPBD Kabupaten Langkat dalam penanggulangan bencana alam.
  13. Apa saja hambatan dalam melakukan penanggulangan bencana dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

- b. Wawancara kepada warga kabupaten Langkat yang pernah mengalami bencana di tahun 2017.
1. Bagaimana kualitas dari penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat?
  2. Bagaimana Ketepatan Waktu dari BPBD Kabupaten Langkat dalam menanggulangi bencana?
  3. Bagaimana efektivitas dari penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat?
  4. Bagaimana kemandirian kerja dari BPBD dalam menanggulangi bencana alam di Kabupate Langkat?

